



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI JAKARTA
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NASRULLOH**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **472156**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.475.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 61 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 305.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 83 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 415.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
4. Tanah Seluas 36 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
5. Tanah Seluas 41 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 497.500.000**

1. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
2. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000
3. MOTOR, YAMAHA PCX Tahun 2019, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 40.000.000
4. MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000
5. MOTOR, YAMAHA N-MAX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 28.500.000
6. MOTOR, YAMAHA FINO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.



16.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERTAGIH	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	68.268.802
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.040.768.802
III. HUTANG	Rp.	5.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.035.768.802

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **28 Januari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.